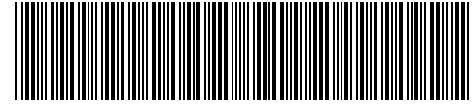




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.409170/2021**



DS:4979-0223-7613-8920

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| 3. Provinsi | : (26) | BENGKULU |
| 4. Kode/Nama Satker | : (409170) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU |
| Sebesar | : Rp. | 1.446.280.000 (SATU MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.03.BF.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 1.446.280.000
Rp. 1.446.280.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 1.446.280.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN B E N G K U L U | (016) Rp. | 1.446.280.000 |
|-------------------------|-----------|---------------|

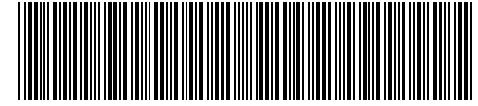
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409170/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4979-0223-7613-8920

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409170) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.446.280.000
Kegiatan	:	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			1.446.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase peningkatan PNBPN Administasi Hukum Umum di wilayah			
		2. 01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah			
		3. 02	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5251.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3,00	Rekomendasi Kebijakan	411.075.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi penyelesaian permasalahan kenotariatan pada Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan di Wilayah	3,00	Rekomendasi Kebijakan	411.075.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5251.AEA	Koordinasi	23,00	kegiatan	232.150.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait	23,00	kegiatan	232.150.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7,00	layanan	732.715.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	7,00	layanan	732.715.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	3.040.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan perkara pada kantor wilayah	1,00	Perkara	3.040.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4,00	Lembaga	67.300.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah	4,00	Lembaga	67.300.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

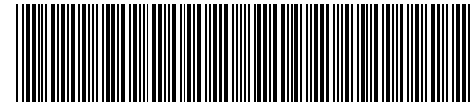
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.03.2.409170/2021

I B. SUMBER DANA



DS:4979-0223-7613-8920

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
 Provinsi : (26) BENGKULU
 Kode>Nama Satker : (409170) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	1.446.280.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	1.446.280.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409170/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



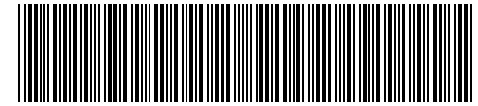
DS:4979-0223-7613-8920

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409170) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409170	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	-	1.446.280	-	-	-	1.446.280		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.446.280	-	-	-	1.446.280		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	1.446.280	-	-	-	1.446.280		
5251.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	411.075	-	-	-	411.075	26 . 51	
04	PNBP	-	411.075	-	-	-	411.075	016	
5251.AEA	Koordinasi (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	232.150	-	-	-	232.150	26 . 51	
04	PNBP	-	232.150	-	-	-	232.150	016	
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	732.715	-	-	-	732.715	26 . 51	
04	PNBP	-	732.715	-	-	-	732.715	016	
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	3.040	-	-	-	3.040	26 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409170/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4979-0223-7613-8920

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409170) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNBP		-	3.040	-	-	-	3.040	016	
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	67.300	-	-	-	67.300	26.51	
04 PNBP		-	67.300	-	-	-	67.300	016	
JUMLAH		-	1.446.280	-	-	-	1.446.280		

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409170/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4979-0223-7613-8920

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409170) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

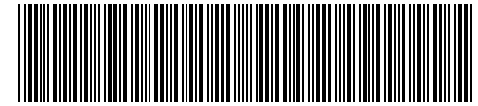
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409170	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	76.419	173.715	139.964	130.289	166.284	185.353	165.554	129.937	109.768	113.046	55.950	1.446.280
		BELANJA BARANG	0	76.419	173.715	139.964	130.289	166.284	185.353	165.554	129.937	109.768	113.046	55.950	1.446.280
	013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	76.419	173.715	139.964	130.289	166.284	185.353	165.554	129.937	109.768	113.046	55.950	1.446.280
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	76.419	173.715	139.964	130.289	166.284	185.353	165.554	129.937	109.768	113.046	55.950	1.446.280

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409170/2021
IV A. B L O K I R**



DS:4979-0223-7613-8920

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409170] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

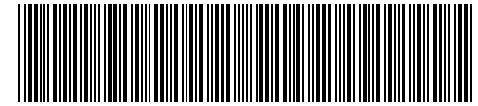
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409170/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:4979-0223-7613-8920

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409170] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.409171/2021**



DS:4069-2700-2014-8361

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (26) BENGKULU
4. Kode>Nama Satker : (409171) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
- Sebesar : Rp. 808.776.000 (DELAPAN RATUS DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 808.776.000
Rp. 808.776.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	808.776.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN B E N G K U L U (016) Rp. 808.776.000

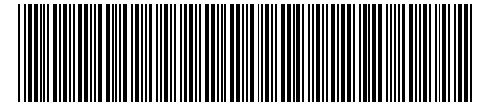
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409171/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



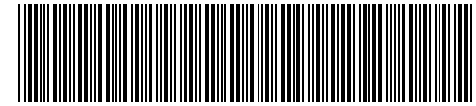
DS:4069-2700-2014-8361

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409171) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	808.776.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	808.776.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Jumlah Layanan Perkantoran	
	: 3. 01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	
	: 4. 01	Jumlah UPT Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT Pemasarakatan	
	: 5. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 6. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 7. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 8. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 9. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 10. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 11. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 12. 01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	
	: 13. 02	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	
	: 14. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 15. 02	Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 16. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 17. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 18. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	
	: 19. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 20. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 21. 02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaaan	
	: 22. 03	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409171/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4069-2700-2014-8361

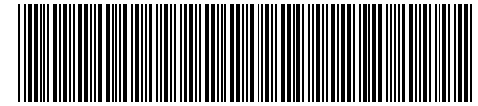
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409171) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- | | |
|--------|---|
| 23. 03 | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal |
| 24. 03 | Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum |
| 25. 03 | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib |
| 26. 03 | Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya |
| 27. 03 | Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan |
| 28. 03 | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan |
| 29. 03 | persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar |
| 30. 04 | Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) |
| 31. 04 | Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin |
| 32. 04 | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani |
| 33. 04 | Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal |
| 34. 04 | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas |
| 35. 04 | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu |
| 36. 05 | Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas) |
| 37. 05 | Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi |
| 38. 05 | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar |
| 39. 06 | Jumlah Layanan Perkantoran |
| 40. 06 | Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan |
| 41. 06 | Persentase narapidana yang bekerja dan produktif |
| 42. 06 | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar |
| 43. 07 | Jumlah Kendaraan Bermotor |
| 44. 07 | Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi |
| 45. 07 | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) |
-

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409171/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4069-2700-2014-8361

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409171) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I A. 3

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- 46. 08 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- 47. 08 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
- 48. 09 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- 49. 10 Jumlah Gedung/Bangunan

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.AEA	Koordinasi	10,00	kegiatan	314.288.000
Rincian Output		:	01	AEA.001		Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasarakatan di Wilayah	10,00 kegiatan 314.288.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	40,00	orang	218.760.000
Rincian Output		:	01	AEF.001		Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	40,00 orang 218.760.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi	275.728.000
Rincian Output		:	01	BHB.001		Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12,00 operasi 275.728.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409171/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4069-2700-2014-8361

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409171) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

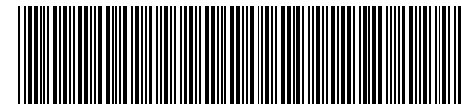
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409171	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	-	808.776	-	-	-	808.776		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	808.776	-	-	-	808.776		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	808.776	-	-	-	808.776		
5252.AEA	Koordinasi (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	314.288	-	-	-	314.288	26 . 51	
01	RM	-	314.288	-	-	-	314.288	016	
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	218.760	-	-	-	218.760	26 . 51	
01	RM	-	218.760	-	-	-	218.760	016	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	275.728	-	-	-	275.728	26 . 51	
01	RM	-	275.728	-	-	-	275.728	016	
JUMLAH		-	808.776	-	-	-	808.776		

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409171/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4069-2700-2014-8361

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409171) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

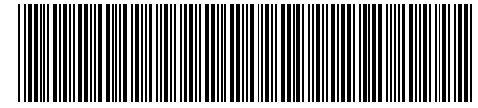
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409171	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	72.038	102.830	212.450	52.300	91.330	64.300	82.600	37.928	51.200	23.600	18.200	808.776
		BELANJA BARANG	0	72.038	102.830	212.450	52.300	91.330	64.300	82.600	37.928	51.200	23.600	18.200	808.776
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	0	72.038	102.830	212.450	52.300	91.330	64.300	82.600	37.928	51.200	23.600	18.200	808.776
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	72.038	102.830	212.450	52.300	91.330	64.300	82.600	37.928	51.200	23.600	18.200	808.776

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409171/2021
IV A. B L O K I R**



DS:4069-2700-2014-8361

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409171] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409171/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:4069-2700-2014-8361

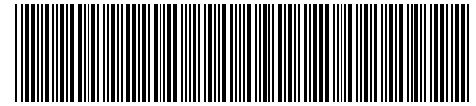
Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409171] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.409172/2021**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (06) | Ditjen Imigrasi |
| 3. Provinsi | : (26) | BENGKULU |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409172) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU |
| Sebesar | : Rp. 772.136.000 | (TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA SERATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	772.136.000
013.06.BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp.	772.136.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 772.136.000 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN B E N G K U L U | (016) Rp. | 772.136.000 |
|-------------------------|-----------|-------------|

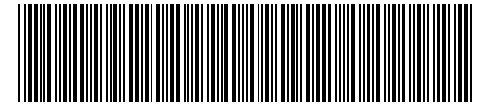
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409172/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2610-5386-2443-2227

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409172) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			772.136.000
Kegiatan	:	5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			772.136.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah			
		2. 02	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah			
		3. 03	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5254.AEA	Koordinasi	7,00	kegiatan	704.486.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah	2,00	kegiatan	64.586.000
		02 AEA.002	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Wilayah	5,00	kegiatan	639.900.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi	67.650.000
Rincian Output	:	01 BHB.U01	Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah	8,00	operasi	26.400.000
		02 BHB.U02	Operasi Mandiri di Wilayah	2,00	operasi	8.800.000
		03 BHB.U03	Operasi Gabungan di Wilayah	1,00	operasi	11.850.000
		04 BHB.U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1,00	operasi	20.600.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Imigrasi

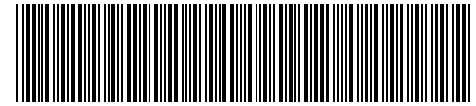
ttd.
Jhoni Ginting
NIP 196106121989031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.06.2.409172/2021

I B. SUMBER DANA



DS:2610-5386-2443-2227

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
 Provinsi : (26) BENGKULU
 Kode>Nama Satker : (409172) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

		Rp.	772.136.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2021					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni			0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB			772.136.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri			0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung			0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS			0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409172/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2610-5386-2443-2227

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409172) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

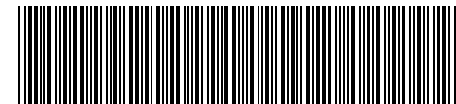
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409172	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	-	772.136	-	-	-	772.136		
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	772.136	-	-	-	772.136		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	772.136	-	-	-	772.136		
5254.AEA	Koordinasi (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	704.486	-	-	-	704.486	26 . 51	
04	PNBP	-	704.486	-	-	-	704.486	016	
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	67.650	-	-	-	67.650	26 . 51	
04	PNBP	-	67.650	-	-	-	67.650	016	
JUMLAH		-	772.136	-	-	-	772.136		

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Jhoni Ginting
NIP 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409172/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2610-5386-2443-2227

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409172) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

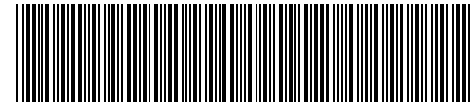
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409172	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	9.766	17.444	108.043	94.001	33.483	75.997	55.248	46.566	134.321	117.485	49.799	29.983	772.136
		BELANJA BARANG	9.766	17.444	108.043	94.001	33.483	75.997	55.248	46.566	134.321	117.485	49.799	29.983	772.136
	013.06.BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	9.766	17.444	108.043	94.001	33.483	75.997	55.248	46.566	134.321	117.485	49.799	29.983	772.136
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	9.766	17.444	108.043	94.001	33.483	75.997	55.248	46.566	134.321	117.485	49.799	29.983	772.136

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Jhoni Ginting
NIP 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409172/2021
IV A. B L O K I R**



DS:2610-5386-2443-2227

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409172] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

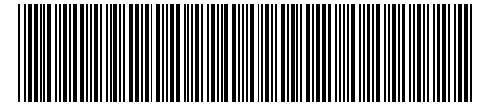
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Jhoni Ginting
NIP 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409172/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:2610-5386-2443-2227

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409172] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

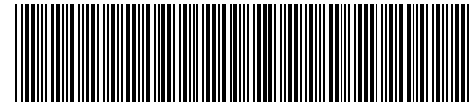
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Jhoni Ginting
NIP 196106121989031003



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.07.2.409173/2021**



DS:0210-2879-7180-7168

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
3. Provinsi : (26) BENGKULU
4. Kode/Nama Satker : (409173) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
- Sebesar : Rp. 955.915.000 (SEMBILAN RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.07.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.07.BF.5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 955.915.000
Rp. 955.915.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	955.915.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN B E N G K U L U (016) Rp. 955.915.000

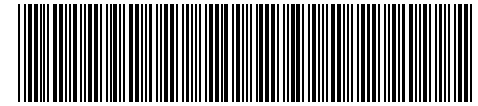
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409173/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0210-2879-7180-7168

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409173) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			955.915.000
Kegiatan	:	5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			955.915.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah			
		2. 01	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual			
		3. 02	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah			
		4. 02	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah			
		5. 03	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5253.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	990,00	orang	666.260.000
Rincian Output	:	01	AEF.001 Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual	940,00	Orang	634.855.000
		02	AEF.002 Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	50,00	Orang	31.405.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5253.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	19,00	layanan	126.820.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Pelayanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	19,00	layanan	126.820.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5253.BKB	Pemantauan produk	1,00	laporan	162.835.000
Rincian Output	:	01	BKB.001 Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah	1,00	Laporan	162.835.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

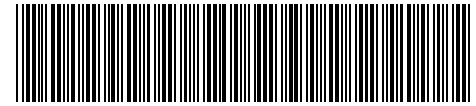
ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.07.2.409173/2021

I B. SUMBER DANA



DS:0210-2879-7180-7168

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
 Provinsi : (26) BENGKULU
 Kode>Nama Satker : (409173) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	955.915.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	955.915.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409173/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0210-2879-7180-7168

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409173) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409173	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	-	955.915	-	-	-	955.915		
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	955.915	-	-	-	955.915		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	955.915	-	-	-	955.915		
5253.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	666.260	-	-	-	666.260	26 . 51	
04	PNBP	-	666.260	-	-	-	666.260	016	
5253.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	126.820	-	-	-	126.820	26 . 51	
04	PNBP	-	126.820	-	-	-	126.820	016	
5253.BKB	Pemantauan produk (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	162.835	-	-	-	162.835	26 . 51	
04	PNBP	-	162.835	-	-	-	162.835	016	
JUMLAH		-	955.915	-	-	-	955.915		

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409173/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0210-2879-7180-7168

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409173) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

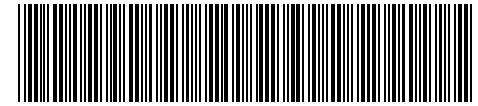
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409173	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	65.501	66.325	118.044	163.738	157.238	166.570	67.452	62.934	77.163	9.750	1.200	955.915
		BELANJA BARANG	0	65.501	66.325	118.044	163.738	157.238	166.570	67.452	62.934	77.163	9.750	1.200	955.915
	013.07.BF.5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	65.501	66.325	118.044	163.738	157.238	166.570	67.452	62.934	77.163	9.750	1.200	955.915
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	65.501	66.325	118.044	163.738	157.238	166.570	67.452	62.934	77.163	9.750	1.200	955.915

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409173/2021
IV A. B L O K I R**



DS:0210-2879-7180-7168

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409173] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

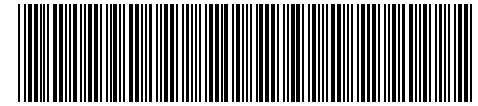
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409173/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:0210-2879-7180-7168

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409173] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

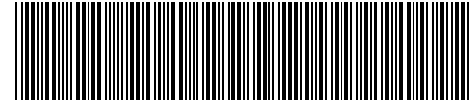
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.409174/2021**



DS:6037-9677-7758-1961

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| 3. Provinsi | : (26) | BENGKULU |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409174) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU |
| Sebesar | : Rp. | 155.000.000 (SERATUS LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi
013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	155.000.000
Rp.	155.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	155.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN B E N G K U L U (016) Rp. 155.000.000

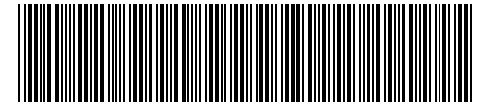
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409174/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6037-9677-7758-1961

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409174) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			155.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			155.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
		2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	25,00	Rekomendasi Kebijakan	137.040.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	25,00	Rekomendasi Kebijakan	137.040.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	25,00	Orang	17.960.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	25,00	Orang	17.960.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

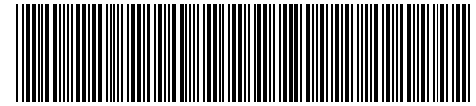
ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.08.2.409174/2021

I B. SUMBER DANA



DS:6037-9677-7758-1961

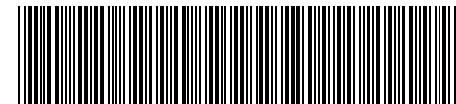
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 Provinsi : (26) BENGKULU
 Kode>Nama Satker : (409174) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

		Rp.	155.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2021					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.	155.000.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409174/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6037-9677-7758-1961

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409174) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409174	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	-	155.000	-	-	-	155.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	155.000	-	-	-	155.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	155.000	-	-	-	155.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	137.040	-	-	-	137.040	26 . 51	
01	RM	-	137.040	-	-	-	137.040	016	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	17.960	-	-	-	17.960	26 . 51	
01	RM	-	17.960	-	-	-	17.960	016	
JUMLAH		-	155.000	-	-	-	155.000		

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409174/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6037-9677-7758-1961

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409174) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

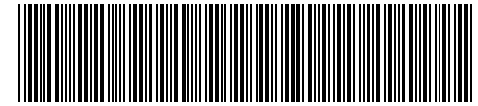
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409174	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	22.090	920	25.104	7.310	9.372	28.570	15.344	3.420	14.168	28.702	0	155.000
		BELANJA BARANG	0	22.090	920	25.104	7.310	9.372	28.570	15.344	3.420	14.168	28.702	0	155.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	22.090	920	25.104	7.310	9.372	28.570	15.344	3.420	14.168	28.702	0	155.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	22.090	920	25.104	7.310	9.372	28.570	15.344	3.420	14.168	28.702	0	155.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409174/2021
IV A. B L O K I R**



DS:6037-9677-7758-1961

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409174] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

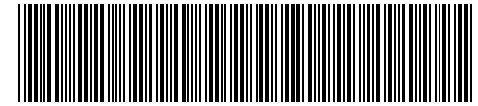
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409174/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:6037-9677-7758-1961

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409174] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

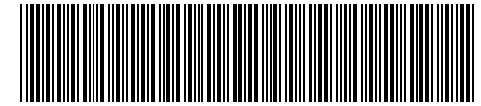
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.01.2.409175/2021**



DS:5524-2940-3841-2041

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | Sekretariat Jenderal |
| 3. Provinsi | : (26) | BENGKULU |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409175) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU |
| Sebesar | : Rp. | 14.384.236.000 (EMPAT BELAS MILIAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.01.WA Program Dukungan Manajemen
013.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Jumlah Uang

Rp.	14.384.236.000
Rp.	14.384.236.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 14.384.236.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN B E N G K U L U | (016) Rp. | 14.384.236.000 |
|-------------------------|-----------|----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409175/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5524-2940-3841-2041

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409175) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.01.WA	Program Dukungan Manajemen				14.384.236.000
Kegiatan	:	1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM				14.384.236.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1558.EAA	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan		13.036.845.000
Rincian Output	:	01 EAA.994	Layanan Perkantoran Kanwil	1,00	Layanan		13.036.845.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1558.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2,00	Layanan		455.500.000
Rincian Output	:	01 EAB.952	Program dan Anggaran Kanwil	1,00	Layanan		230.100.000
		02 EAB.955	Manajemen Keuangan Kanwil	1,00	Layanan		225.400.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1558.EAC	Layanan Umum	1,00	Layanan		307.751.000
Rincian Output	:	01 EAC.956	Manajemen BMN Kanwil	1,00	Layanan		307.751.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1558.EAF	Layanan SDM	134,00	orang		236.170.000
Rincian Output	:	01 EAF.954	Manajemen kepegawaian Kementerian	134,00	orang		236.170.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	1558.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan		154.000.000
Rincian Output	:	01 EAH.961	Reformasi Birokrasi kanwil	1,00	Layanan		154.000.000
Klasifikasi Rincian Output 6	:	1558.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	2,00	Layanan		150.230.000
Rincian Output	:	01 EAI.958	Hubungan Masyarakat Kanwil	1,00	Layanan		143.980.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409175/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5524-2940-3841-2041

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409175) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I A. 2

Layanan Kehumasan dan Protokoler

Layanan

02	EAL.959	Keprotokoleran Kanwil	1.00	Layanan	6.250.000		
Klasifikasi Rincian Output 7	:	1558.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,00	Laporan	43.740.000	
Rincian Output	:	01	EAL.953	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kanwil TA 2021	1.00	Laporan	43.740.000

Jakarta, 23 November 2020
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409175/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5524-2940-3841-2041

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409175) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409175	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	9.135.624	5.248.612	-	-	-	14.384.236		
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen	9.135.624	5.248.612	-	-	-	14.384.236		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	9.135.624	5.248.612	-	-	-	14.384.236		
1558.EAA	Layanan Perkantoran (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	9.135.624	3.901.221	-	-	-	13.036.845	26 . 51	
01	RM	9.135.624	3.901.221	-	-	-	13.036.845	016	
1558.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	455.500	-	-	-	455.500	26 . 51	
01	RM	-	455.500	-	-	-	455.500	016	
1558.EAC	Layanan Umum (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	307.751	-	-	-	307.751	26 . 51	
01	RM	-	307.751	-	-	-	307.751	016	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409175/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5524-2940-3841-2041

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409175) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1558.EAF	Layanan SDM (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	236.170	-	-	-	236.170	26 . 51	
01	RM	-	236.170	-	-	-	236.170	016	
1558.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	154.000	-	-	-	154.000	26 . 51	
01	RM	-	154.000	-	-	-	154.000	016	
1558.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	150.230	-	-	-	150.230	26 . 51	
01	RM	-	150.230	-	-	-	150.230	016	
1558.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	43.740	-	-	-	43.740	26 . 51	
01	RM	-	43.740	-	-	-	43.740	016	
JUMLAH		9.135.624	5.248.612	-	-	-	14.384.236		

Jakarta, 23 November 2020
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409175/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5524-2940-3841-2041

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409175) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409175	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.277.562	1.241.848	1.337.873	1.092.997	1.100.602	1.204.707	1.213.931	1.208.257	1.241.080	1.180.005	1.145.175	1.140.202	14.384.236
		BELANJA PEGAWAI	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.467	9.135.624
		BELANJA BARANG	516.275	480.561	576.586	331.710	339.315	443.420	452.644	446.970	479.793	418.718	383.888	378.735	5.248.612
013.01.WA.1558		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1.277.562	1.241.848	1.337.873	1.092.997	1.100.602	1.204.707	1.213.931	1.208.257	1.241.080	1.180.005	1.145.175	1.140.202	14.384.236
		51 BELANJA PEGAWAI	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.287	761.467	9.135.624
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	516.275	480.561	576.586	331.710	339.315	443.420	452.644	446.970	479.793	418.718	383.888	378.735	5.248.612

Jakarta, 23 November 2020
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409175/2021
IV A. B L O K I R**



DS:5524-2940-3841-2041

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409175] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409175/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:5524-2940-3841-2041

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409175] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

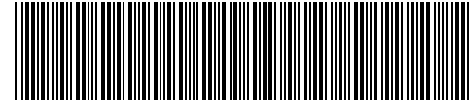
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.409176/2021**



DS:1005-5509-4141-0983

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (09) | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| 3. Provinsi | : (26) | BENGKULU |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409176) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU |
| Sebesar | : Rp. | 243.984.000 (DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM
013.09.BG. Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	243.984.000
Rp.	243.984.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 243.984.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN B E N G K U L U | (016) Rp. | 243.984.000 |
|-------------------------|-----------|-------------|

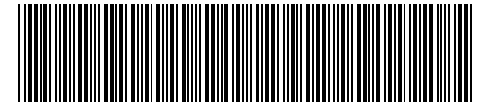
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409176/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1005-5509-4141-0983

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409176) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM			243.984.000	
Kegiatan	:	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			243.984.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM				
		2. 01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah				
		3. 02	jumlah kab/kota peduli HAM				
		4. 03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5255.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4,00	Rekomendasi Kebijakan	97.956.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Fasilitasi Proses Penilaian Kab/Kota Peduli HAM	1,00	Rekomendasi kebijakan	49.636.000
		02	ABD.002	Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	2,00	Rekomendasi Kebijakan	39.520.000
		03	ABD.003	Rekomendasi Analisis Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	8.800.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5255.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan	91.886.000
Rincian Output	:	01	AEA.001	Koordinasi antar Lembaga	2,00	kegiatan	91.886.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	52.342.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah	1,00	Lembaga	52.342.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	5255.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	layanan	1.800.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Data dan Informasi Publik	1,00	Layanan	1.800.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

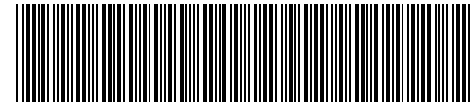
ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.09.2.409176/2021

I B. SUMBER DANA



DS:1005-5509-4141-0983

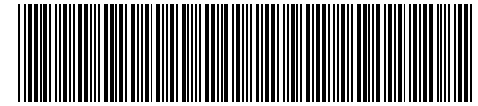
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
 Provinsi : (26) BENGKULU
 Kode>Nama Satker : (409176) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I B. 1

		Rp.	243.984.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2021					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.	243.984.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409176/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



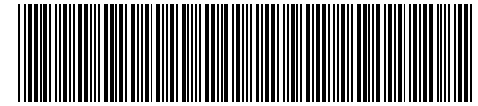
DS:1005-5509-4141-0983

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409176) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409176	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	-	243.984	-	-	-	243.984		
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-	243.984	-	-	-	243.984		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	243.984	-	-	-	243.984		
5255.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	97.956	-	-	-	97.956	26 . 51	
01	RM	-	97.956	-	-	-	97.956	016	
5255.AEA	Koordinasi (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	91.886	-	-	-	91.886	26 . 51	
01	RM	-	91.886	-	-	-	91.886	016	
5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	52.342	-	-	-	52.342	26 . 51	
01	RM	-	52.342	-	-	-	52.342	016	
5255.BMA	Data dan Informasi Publik (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	1.800	-	-	-	1.800	26 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409176/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1005-5509-4141-0983

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409176) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	1.800	-	-	-	1.800	016	
JUMLAH		-	243.984	-	-	-	243.984		

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409176/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1005-5509-4141-0983

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409176) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

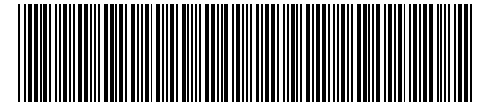
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409176	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	19.802	16.510	24.232	24.568	36.086	33.318	39.374	9.592	4.922	17.610	17.970	243.984
		BELANJA BARANG	0	19.802	16.510	24.232	24.568	36.086	33.318	39.374	9.592	4.922	17.610	17.970	243.984
	013.09.BG.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	0	19.802	16.510	24.232	24.568	36.086	33.318	39.374	9.592	4.922	17.610	17.970	243.984
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	19.802	16.510	24.232	24.568	36.086	33.318	39.374	9.592	4.922	17.610	17.970	243.984

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409176/2021
IV A. B L O K I R**



DS:1005-5509-4141-0983

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409176] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

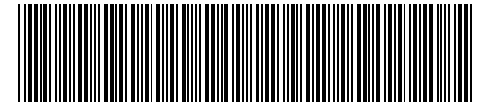
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409176/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:1005-5509-4141-0983

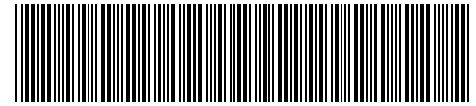
Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409176] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.409177/2021**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 3. Provinsi | : (26) | BENGKULU |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409177) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU |
| Sebesar | : Rp. | 1.820.183.000 (SATU MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH JUTA SERATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.820.183.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBPNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN B E N G K U L U | (016) Rp. | 1.820.183.000 |
|-------------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409177/2021

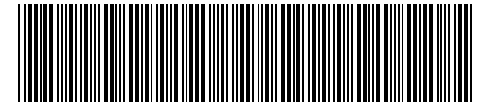


DS:3800-8231-1088-0603

Satker : (409177) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	94.614.000
BB.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	94.614.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.725.569.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	1.725.569.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409177/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



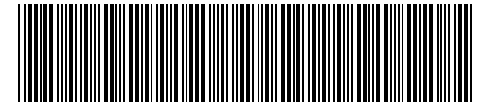
DS:3800-8231-1088-0603

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409177) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			94.614.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			94.614.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	94.614.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	94.614.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.725.569.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			1.725.569.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5,00	Lembaga	89.842.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	Lembaga	89.842.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12,00	Kelompok Masyarakat	130.000.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	10,00	Kelompok Masyarakat	93.950.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	36.050.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409177/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3800-8231-1088-0603

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409177) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

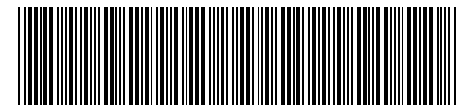
Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		10,00	Lembaga	85.942.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	10,00	Lembaga	85.942.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		10,00	Lembaga	83.715.000
Rincian Output		:	01	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (PN)	10,00	Lembaga	83.715.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		139,00	Orang	1.112.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	139,00	Orang	1.112.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		21,00	Kelompok Masyarakat	224.070.000
Rincian Output		:	01	QBC.001	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	21,00	Kelompok Masyarakat	224.070.000

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409177/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



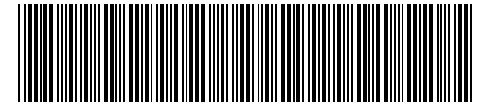
DS:3800-8231-1088-0603

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409177) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409177	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	-	1.820.183	-	-	-	1.820.183		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	94.614	-	-	-	94.614		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	94.614	-	-	-	94.614		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	94.614	-	-	-	94.614	26 . 51	
01	RM	-	94.614	-	-	-	94.614	016	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.725.569	-	-	-	1.725.569		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	1.725.569	-	-	-	1.725.569		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	89.842	-	-	-	89.842	26 . 51	
01	RM	-	89.842	-	-	-	89.842	016	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	130.000	-	-	-	130.000	26 . 51	
01	RM	-	130.000	-	-	-	130.000	016	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409177/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3800-8231-1088-0603

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409177) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	85.942	-	-	-	85.942	26 . 51	
01	RM	-	85.942	-	-	-	85.942	016	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	83.715	-	-	-	83.715	26 . 51	
01	RM	-	83.715	-	-	-	83.715	016	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	1.112.000	-	-	-	1.112.000	26 . 51	
01	RM	-	1.112.000	-	-	-	1.112.000	016	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	224.070	-	-	-	224.070	26 . 51	
01	RM	-	224.070	-	-	-	224.070	016	
JUMLAH		-	1.820.183	-	-	-	1.820.183		

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409177/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3800-8231-1088-0603

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409177) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

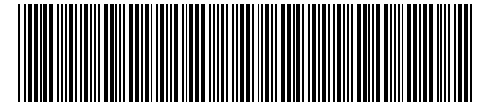
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409177	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	134.622	135.000	199.989	84.350	208.785	105.570	180.330	263.507	207.100	168.900	132.030	1.820.183
		BELANJA BARANG	0	134.622	135.000	199.989	84.350	208.785	105.570	180.330	263.507	207.100	168.900	132.030	1.820.183
013.10.BB.5256		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	0	0	16.204	19.350	7.465	8.070	14.060	20.065	7.000	2.400	0	94.614
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	16.204	19.350	7.465	8.070	14.060	20.065	7.000	2.400	0	94.614
013.10.BF.4841		Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	134.622	135.000	183.785	65.000	201.320	97.500	166.270	243.442	200.100	166.500	132.030	1.725.569
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	134.622	135.000	183.785	65.000	201.320	97.500	166.270	243.442	200.100	166.500	132.030	1.725.569

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409177/2021
IV A. B L O K I R**



DS:3800-8231-1088-0603

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409177] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

tt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409177/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:3800-8231-1088-0603

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409177] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

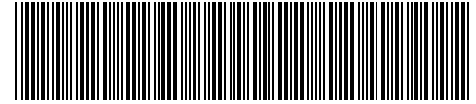
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.409178/2021**



DS:8750-1311-4034-3512

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (11) | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| 3. Provinsi | : (26) | BENGKULU |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409178) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU |
| Sebesar | : Rp. | 208.148.000 (DUA RATUS DELAPAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	208.148.000
013.11.WA.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp.	208.148.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 208.148.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN B E N G K U L U | (016) Rp. | 208.148.000 |
|-------------------------|-----------|-------------|

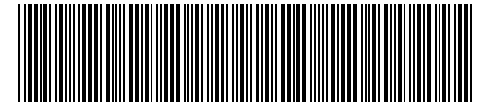
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409178/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8750-1311-4034-3512

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409178) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.11.WA	Program Dukungan Manajemen			208.148.000
Kegiatan	:	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			208.148.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
		2. 02	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	208.148.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Kebijakan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	208.148.000

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409178/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8750-1311-4034-3512

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409178) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

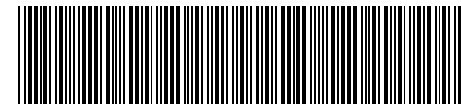
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
409178	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	-	208.148	-	-	-	208.148		
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	208.148	-	-	-	208.148		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	208.148	-	-	-	208.148		
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	208.148	-	-	-	208.148	26 . 51	
01	RM	-	208.148	-	-	-	208.148	016	
JUMLAH		-	208.148	-	-	-	208.148		

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409178/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8750-1311-4034-3512

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (409178) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409178	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.700	34.402	13.033	51.897	20.623	17.230	5.160	26.100	8.480	5.293	15.130	5.100	208.148
		BELANJA BARANG	5.700	34.402	13.033	51.897	20.623	17.230	5.160	26.100	8.480	5.293	15.130	5.100	208.148
	013.11.WA.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	5.700	34.402	13.033	51.897	20.623	17.230	5.160	26.100	8.480	5.293	15.130	5.100	208.148
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.700	34.402	13.033	51.897	20.623	17.230	5.160	26.100	8.480	5.293	15.130	5.100	208.148

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409178/2021
IV A. B L O K I R**



DS:8750-1311-4034-3512

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409178] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

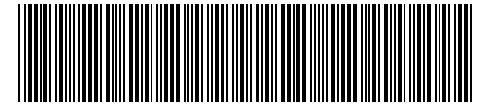
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409178/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:8750-1311-4034-3512

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [409178] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si
NIP 196207021987032001